

**PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA WONOSARI KECAMATAN
BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

Muhammad Abdilah Bayhaqi¹⁾, Syafrianto²⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Universitas Islam Riau/Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Universitas Islam Riau/Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau

e-mail: muhammadabdilahbayhaqi@student.uir.ac.id.

Abstrak

Pemerintahan Desa Wonosari tentunya juga membutuhkan tenaga mahasiswa yang notabennya tentu saja memiliki ilmu dan sudah mempelajari teori tentang ilmu pemerintahan yang baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori peranan. Hasil penelitian ialah kendala Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di desa wonosari kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis tersebut antara lain : Kepala desa banyak kegiatan diluar sehingga kurang pengawasan terhadap pegawai. Terdapat beberapa orang pegawai yang kurang disiplin dengan jadwal atau jam kerjanya. Bahwasannya disana terdapat beberapa orang pegawai yang datang bekerja tidak sesuai dengan jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah.. Masih adanya senioritas dalam melakukan pekerjaan sehingga mengakibatkan banyak para senior yang melimpahkan kerja mereka kepada junior yang sebenarnya hal tersebut harus dihilangkan karena para junior tentu saja memerlukan bantuan dari pihak senior yang lebih berpengalaman. Fasilitas kantor tidak dimanfaatkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Ada beberapa orang pegawai yang menggunakan fasilitas kantor sebagai kepentingan pribadi terlebih dahulu dari pada kepentingan pekerjaannya.

Kata Kunci: Desa, Kepala Desa, Kepemimpinana,Pembangunan

Abstract

The Wonosari Village Government certainly requires university students, who are knowledgeable and have studied theories of good and proper governance. This study employed qualitative research methods, incorporating role theory. The results revealed obstacles to the Village Head's Leadership Role in Increasing Community Participation in Development in Wonosari Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency, including: The village head's numerous outside activities, resulting in insufficient supervision of employees. Several employees lack discipline in their work schedules. Some employees report to work outside the government-determined hours. The persistence of seniority in carrying out work results in many seniors delegating their work to juniors, a practice that should be eliminated because juniors certainly need assistance from more experienced seniors. Office facilities are not utilized properly and appropriately. Some employees use office facilities for personal gain rather than work.

Keywords: Village, Village Head, Leadership, Development

PENDAHULUAN

Pembagian wilayah pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan propinsi, pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan kota, kecamatan, pemerintahan desa. Masing-masing wilayah pemerintahan memiliki wewenang dan sistem pengaturannya masing-masing yang bertugas untuk mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam undang-undang dasar negara republik indonesia juga menyebutkan bahwa negara Indonesia juga mengakui serta menghormati adanya persatuan masyarakat adat serta negara memberikan hak-hak tradisional sesuai adat dan budaya yang di miliki oleh masyarakat adat sepanjang mereka masih hidup di dalam kehidupan masyarakat adat dan memegang prinsip negara kesatuan Indonesia. Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 18 B ayat 2 uud 1945. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa pemerintahan Indonesia mengakui adanya pemerintahan daerah baik itu daerah provinsi, kabupaten atau kota bahkan kecamatan dan desa.

Khususnya untuk pemerintahan daerah dibetnuklah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah itu sendiri. Dibuatnya Undang- Undang ini memiliki tujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah untuk menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya. Dalam Pasal 1 Ayat (1) ketentuan umum menyebutkan bahwa pemerintahan pusat adalah pemerintahan republik indonesia yang dikerjakan oleh presiden dan wakil presiden. Seiring perkembangan zaman era reformasi telah membawa banyak perubahan baik itu dari pemerintahan pusat maupun dari pemerintahan ditingkat daerah. Perubahan yang terjadi ditingkat daerah ialah dengan adanya pemberian kewenangan kepada daerah

untuk mengurus sendiri rumah tangganya pemerintahan daerahnya masing-masing.

Memberikan kebijakan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri merupakan program percepatan sistem pelayanan pemerintahan. Desa yang merupakan unit terdekat yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga bagaimana pelayanan dan sistem pemerintahan didesi memberikan gambaran kepada masyarakat yang akan memberikan penilaian kepada pemerintah ditingkat-tingkat selanjutnya (Widjaja, 2008:76). Otonomi daerah memiliki tujuan untuk mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang mana dengan adanya laporan dari pemerintahan desa membuat pemerintah pusat paham dan mengerti tentang apa yang dibutuhkan masyarakat yang ada di daerah-daerah diseluruh indonesia. Desa juga merupakan suatu kelompok terkecil dari percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Bunarto & Wasistono, 2017:6). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya desa menjadi suatu fakta tentang adanya pertumbuhan ekonomi, sosial, politik dan budaya didalam masyarakat Indonesia.

Pengertian tentang desa juga dapat disimpulkan bahwa desa itu adalah suatu daerah yang memiliki batas wilayah yang jelas dan terorganisir oleh pemerintahan desa serta memiliki masyarakat yang terdiri dari suatu kesatuan dan hidup saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Desa merupakan bagian terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus sendiri rumah tangganya yang dimaksud ialah seperti pengurusan masyarakatnya, pertumbuhan ekonomi, percepatan pemnagunan dan mengontrol kehidupan sosial dan budaya yang hidup didesa tersebut.

Desa yang mengandung arti sebagai tempat tinggal, tempat asal, asal

daerah atau tanah tempat tinggal leluhur yang mana daerah tersebut memiliki suatu susunan masyarakat yang hidup berdasarkan norma-norma serta memiliki batas wilayah yang cukup jelas (Rauf & Maulida, 2015:9).

Saya memilih Desa Wonosari untuk menjadi lokasi magang saya pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau dikarenakan lokasi Desa Wonosari yang jarang sekali dijadikan untuk tempat magang oleh mahasiswa pada umumnya. Belum adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan magang di Desa Wonosari ini tentu saja membuat para pegawai dan kepala desa sangat antusias menerima mahasiswa yang ingin melakukan program magang di kantor desa tersebut.

Pemerintahan Desa Wonosari tentunya juga membutuhkan tenaga mahasiswa yang notabennya tentu saja memiliki ilmu dan sudah mempelajari teori tentang ilmu pemerintahan yang baik dan benar. Maka dari itu adanya program magang yang saya laksanakan di Desa Wonosari juga merupakan pertukaran Informasi dan pertukaran ilmu baik itu antara saya sebagai mahasiswa magang yang membutuhkan ilmu praktek kerja lapangan dengan para karyawan kantor desa yang juga perlu mengupgrade ilmu mereka tentang sistem pemerintahan desa yang baik.

Pada kegiatan magang ini saya nantinya akan membantu untuk mempermudah bagian kasi pemerintahan untuk menjalankan tugasnya. Kasi pemerintahan merupakan perangkat desa yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas operasional di bidang pemerintahan desa. Maka dengan demikian seharusnya yang bertugas dan menduduki bagian kasi pemerintahan ini tentu saja mereka yang memiliki ilmu yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut.

Maka dengan latar belakang yang telah disebutkan diatas Tema magang saya pada kegiatan magang yang dilaksanakan di Kantor Desa Wonosari dengan Tema **“Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini merupakan metode yang sangat relevan meneliti fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat, karena pengamatan diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan berdasarkan pada variabel atau hipotesis sehingga melalui metode kualitatif penelitian yang dilakukan dapat memperoleh informasi yang lebih detail mengenai kondisi, situasi, dan peristiwa yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain.(Kartini Kartono: 2018:34).

Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya kepemimpinan ini meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi atau instansi, memotivasi perilaku bawahan untuk mencapai tujuannya, mempengaruhi untuk perbaikan kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan.

Dalam suatu instansi kepemimpinan merupakan suatu faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu instansi, dengan kepemimpinan yang baik proses dari manajemen akan berjalan lancar dan pegawai bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja dan proses manajemen suatu instansi akan baik, jika tipe cara atau gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpinnya baik.

Fungsi seorang pemimpin beserta teknik kepemimpinannya berbeda menurut situasi dimana yang pemimpin melakukan kegiatannya. Kelompok-kelompok yang satu sama lain berbeda macamnya, berbeda besarnya, berbeda sifat pemilihannya serta berbeda fungsi dan tujuannya menghendaki cara kepemimpinan yang berbeda pula.

- 1) Pemimpin sebagai eksekutif (Executive Leader)

Seringkali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adakah menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan, dia memimpin dan mengawasi tindakan orang-orang yang menjadi bawahannya dan

membuat keputusan-keputusan yang kemudian memerintahkannya untuk dilaksanakan. Kepemimpinan ini banyak ditemukan didalam masyarakat dan biasanya bersifat pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah memerlukan fungsi tersebut.

2) Pemimpin sebagai penengah

Dalam masyarakat modern, tanggung jawab keadilan terletak di tangan pemimpin dengan keahliannya yang khas dan ditunjuk secara khusus, ini dikenal dengan pengadilan dan bidang lainnya, umpamanya dalam bidang olahraga, terdapat wasit yang mempunyai tugas sebagai wasit.

3) Pemimpin sebagai penganjur

Sebagai propagandis, sebagai juru bicara atau sebagai pengarah opini merupakan orang-orang penting dalam masyarakat. Mereka bergerak dalam bidang komunikasi dan publistik yang menguasai ilmu komunikasi. Penganjur adalah sejenis pemimpin yang memberi inspirasi kepada orang lain. Seringkali ia merupakan orang yang pandai bergaul dan fasih berbicara.

4) Pemimpin sebagai ahli

Pemimpin sebagai ahli dapat dianalogikan sebagai instruktur atas seorang juru penerang, berada dalam posisi khusus dalam hubungannya dengan unit social dimana dia bekerja. Kepemimpinannya hanya berdasarkan fakta dan hanya pada bidang dimana terdapat fakta. Termasuk dalam kategori ini adalah guru, petugas social, dosen, dokter, ahli hukum, dan sebagainya yang mencapai dan memelihara pengaruhnya karena mereka mempunyai pengetahuan untuk diberikan kepada orang lain.

5) Pemimpin diskusi

Tipe pemimpin yang seperti ini dapat dijumpai dalam lingkungan kepemimpinan yang demokratis dimana komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Seseorang yang secara lengkap memenuhi kriteria kepemimpinan demokratis ialah orang yang menerima peranannya sebagai pemimpin diskusi

Dalam melaksanakan tugas tentunya masih terdapat kendala dan kekurangan yang dijumpai selama proses saya melaksanakan kegiatan magang maka adapun kendala Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di desa wonosari kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis tersebut antara lain :

- a) Kepala desa banyak kegiatan diluar sehingga kurang pengawasan terhadap pegawai
- b) Terdapat beberapa orang pegawai yang kurang disiplin dengan jadwal atau jam kerjanya. Bahwasannya disana terdapat beberapa orang pegawai yang datang bekerja tidak sesuai dengan jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c) Masih adanya senioritas dalam melakukan pekerjaan sehingga mengakibatkan banyak para senior yang melimpahkan kerja mereka kepada junior yang sebenarnya hal tersebut harus dihilangkan karena para junior tentu saja memerlukan bantuan dari pihak senior yang lebih berpengalaman.
- d) Fasilitas kantor tidak dimanfaatkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Ada beberapa orang pegawai yang menggunakan fasilitas kantor sebagai kepentingan pribadi terlebih dahulu dari pada kepentingan pekerjaannya.

SIMPULAN

Kesimpulan yang saya buat dalam program magang yang saya laksanakan adalah sebagai berikut :

Terkait Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sudah dilakukan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Dalam melaksanakan tugas tentunya masih terdapat kendala dan kekurangan yang dijumpai selama proses saya melaksanakan kegiatan magang maka adapun kendala Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di desa wonosari kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis tersebut antara lain :

- a) Kepala desa banyak kegiatan diluar sehingga kurang pengawasan terhadap pegawai
- b) Terdapat beberapa orang pegawai yang kurang disiplin dengan jadwal atau jam kerjanya. Bahwasannya disana terdapat beberapa orang pegawai yang datang bekerja tidak sesuai dengan jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c) Masih adanya senioritas dalam melakukan pekerjaan sehingga mengakibatkan banyak para senior yang melimpahkan kerja mereka kepada junior yang sebenarnya hal tersebut harus dihilangkan karena para junior tentu saja memerlukan bantuan dari pihak senior yang lebih berpengalaman.
- d) Fasilitas kantor tidak dimanfaatkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Ada beberapa orang pegawai yang menggunakan fasilitas kantor sebagai kepentingan pribadi terlebih dahulu dari pada kepentingan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakir, R. S. 2009 *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Berry, D. (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Blanchard, K. H., & Hersey, P. (2017). Great Ideas Revisited. *Training & Development*, 50(1), 42–48.
- Darmono. 2001. *Manajemen dan Tata Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Grasindo.
- Hafis, R. I. (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publisher.
- Hamzah, U. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusby, & Zulkifli. (2017). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjamada Press.
- Suwarno, Wiji. 2009. *Psikologi Perpustakaan*. Jakarta: Sagung Seto
- Syafi'i, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Wasistino. (2006). *Proses Pengembangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasistono, S. (2017). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai Ke Kontenporer)*. Sumedang: IPDN Press.
- Mulayadi Dedi. 2015 *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Kosep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Ndraha. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ni“matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Pipin. Syarifin. 2012 *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung Cv. Pustaka Setia.
- Puja Dwi Fitri *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima (Studi Kasus Tentang Penataan dan Pembinaan Kaki Lima di Kecamatan Sail Kota PEkanbaru)*. Univeritas Islam Riau. 2021
- Ramizal Hidayat *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi kasus Video Game/Play Station Di Kecamatan Tampan Dan Marpoyan)*. Univeritas Islam Riau. 2021
- Roy Martin Moonti. *Ilmu Perundang-Undangan*. Karetakupa, Jakarta. 2017. hlm 12
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta2006
- Suwanda, D dan Piliang, AK 2016, *Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif*, Rosdakarya, Bandung
- Syafrinaldi, *Panduan Penulisan Skripsi Edisi 2 Fakultas Hukum UIR*, UIR Press, Pekanbaru2013 Hlm. 19 Syaukani. (2002). *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Taliziduhu, N. (2013). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Terry, G. L. (2019). *A Study of the Disposition of Government-owned War Plants and Equipment*. Graduate School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania.
- Thoha, M. 2012 *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. (2007). *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Kencana.
- Yusri Munaf. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah,
Peraturan Gubernur Nomor 46 Nomor 46
Tahun 2020 Tentang
Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan
Provinsi Riau.